

Liburan Lebaran yang Mengkhawatirkan

Efisiensi Anggaran Bikin Pengusaha Wisata dan Perhotelan Cemas

SEPERTI sudah menjadi budaya. Setiap usai lebaran, masyarakat Indonesia berwisata. Mereka memanfaatkan tenggang waktu libur yang diberikan pemerintah. Tahun ini lebih panjang.

Menurut SKB 3 Menteri, ada enam tanggal merah libur nasional dan cuti bersama Idulfitri. Jika ditambah dua tanggal merah libur nasional dan cuti bersama Nyepi dan tiga hari libur akhir pekan. Maka total ada 11 hari libur periode lebaran 2025.

Suasana sejumlah tempat wisata di Kaltim pun ramai. Dari pantai yang dikelola swasta dan pemerintah. Hingga ekowisata yang dikelola kelompok masyarakat. Di Pantai Manggar misalnya. Selama libur lebaran, sudah 13 ribuan warga yang berlibur di Pantai Manggar sejak hari pertama lebaran, Senin (31/3) hingga Jumat (4/4).

Baginya, sejumlah kebijakan untuk meringankan beban masyarakat pada momen lebaran cenderung dimanfaatkan masyarakat untuk melaksanakan “kewajiban” mudik. Seperti diskon tiket pesawat misalnya. Di mana Kaltim yang banyak dihuni pekerja pendatang, lebih banyak memanfaatkannya. Sehingga berpengaruh pada kondisi kunjungan wisata lokal.

“Seperti Balikpapan ini kan kebanyakan pekerja dari luar Kaltim. Jadi mereka terbantu untuk mudik. Mengesampingkan niat untuk berwisata,” ucapnya.

Dampak efisiensi dalam hal perjalanan dinas dan penyelenggaraan kegiatan, serta seminar di hotel membuat roda ekonomi antar-daerah pun disebutnya melambat. Padahal banyak kegiatan pemerintahan yang berkunjung ke daerah lain menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) yang dituju.

“Dari Jakarta biasanya banyak membuat *event* di Balikpapan. Saya enggak tahu apa yang akan terjadi setelah libur lebaran ini. Bisa saja ada gelombang PHK (pemutusan hubungan kerja). Jika kebijakan terus berlaku” ucapnya.

Kuncinya, kata dia, ekonomi masyarakat akan bergerak. Jika sektor wisata juga bergerak. Berbeda dengan sektor industri lainnya, seperti pertambangan, Joko menyebut pariwisata sangat memberikan dampak langsung bagi ekonomi masyarakat. Itu sebabnya, setiap daerah yang pariwisatanya maju, maka ekonomi masyarakatnya ikut maju. Hingga bisa mengerem lajunya inflasi.

“Sayangnya ini tidak disadari pemerintah. Memang tujuannya bagus. Namun sayangnya pemerintah tidak punya strategi untuk mengantisipasi dampak negatifnya. Saya sudah kerap bicara hingga pusat. Pemerintah tidak siap. Wisata kita didominasi oleh wisatawan Nusantara, yang sebagian besar berasal dari perjalanan dinas,” ujarnya.

Bagi Joko, kesalahan pemerintah yakni masih belum menerapkan promosi pariwisata yang strategis. Terutama untuk menggaet wisatawan mancanegara datang ke Indonesia.

Ketika kondisi yang tidak mendukung pariwisata seperti saat ini, maka daerah-daerah yang semula bergantung pada wisatawan lokal bakal kelimpungan.

“Seperti Balikpapan, saat ini memang banyak yang datang karena melimpahnya proyek strategis. Tapi kalau proyeknya selesai, orang bakal pergi lagi. Sementara saya melihat dinas-dinas di provinsi dan kabupaten/kota tidak punya strategi antisipasi itu. Bagaimana cara promosi mendatangkan orang untuk berwisata. Sayangnya itu belum dilakukan dengan baik,” ungkapnya.

Joko memberi gambaran, khususnya di tengah pembangunan IKN saat ini. Maka seharusnya momen itu menjadi waktu yang tepat bagi pemerintah menggenjot promosi untuk datang ke Kaltim.

Mengingat proses pembangunan IKN adalah momentum sejarah. “Itu yang harusnya jadi *branding*. Mereka yang berkunjung ke IKN akan menjadi saksi sejarah pembangunan yang akan diceritakan kelak ke anak-cucu mereka jika IKN nantinya sudah jadi,” sebutnya.

DISELAMATKAN KULTUR

Momen libur Lebaran akan dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk berwisata. Itu sudah menjadi budaya. Sehingga dalam momen ini, pemerintah seharusnya memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan hingga mempersiapkan diri menghadapi kondisi selanjutnya.

“Berwisata di libur lebaran sudah menjadi kultur. Dari berbagai kalangan mulai bawah hingga atas. Membuat arus manusia, logistik, dan transportasi meningkat hingga tiga kali lipat. Orang Indonesia tidak pernah merasa rugi. Karena nilai kebahagiaan bersama keluarga. Itu fenomena kultural,” ucap pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Aji Sofyan Effendi.

Wisata pun akan berdampak lanjutan pada sektor lain. Seperti industri hiburan, hotel, hingga UMKM. Di mana akan meningkat dibandingkan hari biasa. Berdampak pula pada pemasukan daerah baik dari pajak hingga retribusi. Jadi bisa disebut, kondisi ekonomi Indonesia, diselamatkan oleh kultur masyarakat berwisata di momen seperti libur lebaran ini.

“Ada tradisi bagi-bagi THR (tunjangan hari raya) utamanya ke anak-anak. Yang banyak membantu keluarga untuk bisa merealisasikan liburan mereka ke tempat yang dianggap mereka mampu. Itu fenomena ekonomi yang condong kepada kultur masyarakat yang tidak terdampak oleh lesunya ekonomi, PHK sampai efisiensi anggaran,” sebut Aji yang saat diwawancara sedang berwisata di Pantai Manggar, Balikpapan.

Karena sifatnya jangka pendek hingga H+7 Idulfitri, maka Aji menyebut baru setelahnya berlaku efek dari efisiensi anggaran. Karena itu, dirinya mengingatkan pemerintah untuk bisa mengantisipasi dampak dan menyiapkan langkah konkret agar sektor yang berkaitan dengan pariwisata tidak langsung terpuruk usai momen libur lebaran.

“Pemerintah melalui Perusda harus melakukan pembenahan tanpa harus menggusur masyarakat lokal. Tidak melibatkan entitas bisnis swasta. Segmen itu penting untuk menjaga ekonomi lokal. Dan harus menjaga alam tetap lestari,” sebutnya.

Di sisi lain, meski sejumlah objek wisata di wilayah seperti Samarinda dan Balikpapan mudah diakses. Sayangnya untuk destinasi unggulan Kaltim seperti Derawan dan Maratua masih sulit dijangkau. Karena itu, Aji menilai perlu diperbanyak pengadaan transportasi massal oleh pemerintah sehingga masyarakat makin mudah berwisata ke sana.

“Pengadaan akses dan transportasi sangat penting untuk memajukan wisata di sebuah daerah. Derawan dan Maratua misalnya. Saat ini hanya bisa diakses dengan menggunakan kapal kecil. Kenapa tidak pemerintah mengadakan semacam kapal wisata dengan yang lebih *safety* dan nyaman,” ucapnya. **(rd)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Liburan Lebaran yang Mengkhawatirkan , 06/04/2025

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU 10/2009) bahwa kepariwisataan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. menghapus kemiskinan;
 - d. mengatasi pengangguran;
 - e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
 - f. memajukan kebudayaan;
 - g. mengangkat citra bangsa;
 - h. memupuk rasa cinta tanah air;
 - i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
 - j. mempererat persahabatan antarbangsa.
2. Diatur dalam Pasal 29 UU 10/2009 bahwa pemerintah provinsi berwenang:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
 - d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi;
 - e. menetapkan daya tarik wisata provinsi;
 - f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
 - g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan
 - h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
3. Dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2037 (Perda Provinsi Kaltim 5/2022) diatur sebagai berikut:

- (1) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan minat wisatawan nusantara dan mancanegara untuk berwisata ke daerah dengan peningkatan jumlah kunjungan dan durasi tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - b. pengembangan destinasi pariwisata utama sebagai daya tarik wisata unggulan daerah yang diperkaya oleh kesenian, tradisi, dan budaya masyarakat setempat;
 - c. pengembangan destinasi pariwisata alam dan budaya lain sebagai penunjang destinasi pariwisata utama; peningkatan jumlah penerimaan dari sektor kegiatan kepariwisataan; dan
 - d. keseimbangan pembangunan kepariwisataan dan pembangunan sektor pendukung lain di wilayah daerah.
- (2) Capaian sasaran pembangunan kepariwisataan daerah diukur dalam bentuk angka melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, peningkatan jumlah pergerakan wisatawan nusantara, dan produk domestik regional bruto daerah dari pariwisata yang tercantum dalam lampiran i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
4. Dalam Pasal 25 Perda Provinsi Kaltim 5/2022 diatur bahwa strategi pembangunan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:
 - a. penguatan citra destinasi wisata;
 - b. diseminasi citra pariwisata dalam informasi dan promosi pariwisata;
 - c. identifikasi berbagai sumber wisatawan potensial; dan
 - d. menyusun materi promosi yang informatif, efektif, dan efisien.